

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peristiwa kematian akibat minuman beralkohol sampai saat ini sering terjadi. Indonesia sebagai negara hukum yang di dalam konstitusinya menjamin bahwa setiap warga negaranya berhak hidup sejahtera baik secara lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kedua hal tersebut bertolak belakang yang menggambarkan efektifitas hukum yang belum maksimal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol. Kajian ini bermaksud untuk membahas mengenai permasalahan bagaimana pengaturan minuman keras/alkohol di Indonesia atau lebih khususnya di Kota Malang serta bagaimana penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol di Indonesia. Masalah ini menjadi penting untuk dikaji mengingat hingga saat ini pengaturan mengenai minuman keras/alkohol masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. RUU mengenai Larangan Minuman Beralkohol diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan hukum mulai dari pengendalian minuman beralkohol sampai dengan batasan mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Penegakan hukum pengaturan minuman keras/alkohol belum secara optimal terealisasi di Indonesia, hal ini

disebabkan beberapa faktor efektivitas hukum yang belum terpenuhi secara maksimal.

Eksistensi hukum di masyarakat memang tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara individu maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Hukum bahkan dibutuhkan baik dalam pergaulan yang sederhana hingga pergaulan antar-bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.<sup>1</sup>

Berbagai media massa di Indonesia, baik media cetak ataupun televisi yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai peristiwa kematian akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Dampak terhadap masyarakat yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga terasa, yaitu menjadi korban dari si peminum minuman beralkohol, mulai dari meningkatnya kasus kriminal hingga kemiskinan. Hal tersebut yang menyebabkan perubahan nilai terhadap minuman beralkohol dimasyarakat. Perubahan nilai baik secara hukum positif maupun agama dianggap merupakan hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar dilakukan.

Berdasarkan data dari badan pusat statistik kriminal tahun 2016 angka kejahatan secara umum Polda Jawa Timur menduduki posisi kedua

---

<sup>1</sup> Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu, hal.2.

yakni dengan 35.437 kasus kejahatan yang dihitung secara keseluruhan tindak pidana kejahatan.<sup>2</sup> Apabila lebih spesifik lagi mengenai tingkat kejahatan yang disebabkan oleh minuman keras yang terjadi di Kota Malang terhitung sejak tahun 2014 hingga 2016 tercatat sebanyak 72 kasus.<sup>3</sup> Adakalanya kejahatan kekerasan dengan pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan terjadi akibat pengaruh minuman keras/alkohol. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol, yang apabila mengkonsumsinya secara berlebihan dan secara terus menerus dapat menyebabkan kehilangan kesadaran, membahayakan kesehatan baik rohani maupun jasmani, perilaku, cara berpikir, dan kematian, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan bermasyarakat.

Informasi dari media massa dan data tersebut bertolak belakang dari tujuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal konstitusi tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara Indonesia tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan harus dihormati, agar setiap warga negara Indonesia dapat menikmati kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Negara berkewajiban mengatur masyarakat melalui peraturan

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2016*, Diakses dari artikel 5\_6109393659172487508.pdf pada tanggal 8 Januari 2019

<sup>3</sup> <https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/06/22/541/jumlah-tindak-kejahatan-yang-dilaporkan-dan-yang-diselesaikan-menurut-jenis-kejahatan-di-kota-malang-2014-2016.html> Diakses pada tanggal 8 Januari 2019

perundang-undangan, khususnya mengenai peredaran dan penanganan minuman beralkohol. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait peredaran minuman keras/alkohol dibuat untuk mengakomodir tujuan dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menjadi dasar hukum tertinggi dalam hal pengawasan peredaran minuman keras/alkohol di Indonesia, peraturan tersebut dibuat karena Mahkamah Agung dengan Putusan No. 42P/HUM/2012 tertanggal 18 Juni 2013 menyatakan Keputusan Presiden No.3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 berbenturan dengan sejumlah peraturan daerah yang melarang total peredaran minuman beralkohol. Seharusnya Perpres memberikan ruang pada peraturan daerah untuk membatasi secara total peredaran minuman beralkohol di wilayahnya. Inti substansi hukum dari Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 adalah menetapkan bahwa minuman beralkohol boleh beredar kembali dengan pengawasan. Dalam Perpres tersebut minuman beralkohol juga dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan. Pertama golongan A adalah

minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen). Kedua, golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai 20% (dua puluh persen). Ketiga, golongan C yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai 55% (lima puluh lima persen). Pasal 7 Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 menegaskan bahwa minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya boleh dijual di sejumlah tempat diantaranya hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan. Selain itu, minuman beralkohol juga dapat diperjualbelikan di toko bebas bea.<sup>4</sup>

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Alkohol juga sudah mengatur sedemikian rupa baik pengaturan beserta sanksinya, yang mana pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan<sup>5</sup> :

*Setiap orang atau perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A harus memiliki SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol golongan A yang boleh dijual.*

Dan pada Pasal 8 ayat (2) <sup>6</sup>:

*Setiap orang atau perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk diminum langsung di tempat wajib memiliki SIUP dan SIUP MB yang diterbitkan oleh Walikota.*

---

<sup>4</sup> Harris Yonatan Parmahan Sibuea, 2016, *PENEGAKAN HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL (LAW ENFORCEMENT REGULATION OF ALCOHOLIC BEVERAGES)* ,Jurnal Hukum Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan No.1 Vol.7,hal 1.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Malang No.5 Tahun 2006 Tentang *Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Alkohol* <https://hukum.malangkota.go.id/> Diakses pada tanggal 7 September 2018

<sup>6</sup> Ibid.,

Pada peraturan daerah tersebut juga terdapat larangan mengenai apabila minuman keras/alkohol dijual oleh penjual yang tidak memiliki ijin akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, pada Pasal 17 menyatakan<sup>7</sup> :

*Siapapun dilarang memproduksi, mengedarkan, memasukkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Sedangkan untuk sanksi terdapat pada Pasal 23 ayat (1) <sup>8</sup>:

*Setiap orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*

Terkait minuman beralkohol di Indonesia, diperlukan pembuatan hukum dari pemerintah untuk membentuk suatu regulasi apakah itu pengawasan, pengendalian hingga pelarangan, yang sampai saat ini dasar peredaran minuman beralkohol di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, kemudian dilanjutkan dengan peraturan pelaksana yakni Peraturan Menteri Perdagangan No.6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Perizinan Minuman Beralkohol.

---

<sup>7</sup> Ibid.,

<sup>8</sup> Ibid.,

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani masalah minuman beralkohol. Tanggung jawab pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan dan kebijakan atau melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran minuman beralkohol, namun juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak mengkonsumsi minuman beralkohol.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah peredaran dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang dengan judul **ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, yang ingin menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penanganan dan pelaksanaan sanksi terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin di Kota Malang ?
2. Apa saja kendala aparat penegak hukum dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin di Kota Malang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pencegahan dan penanggulangan minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin di Kota Malang.
- b. Mengetahui kendala yang dialami oleh penegak hukum terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin di Kota Malang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa manfaat yaitu secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

#### **2. Pengusaha**

Dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai peredaran minuman beralkohol yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

#### **3. Polisi**

Untuk memberikan informasi yang dapat membantu aparat penegak hukum khususnya Polisi dalam menanggulangi Peredaran Minuman beralkohol di masyarakat dan sebagai himbauan serta



tambahan semangat yang dapat meningkatkan kualitas para penegak hukum agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya.

#### 4. Masyarakat

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat karena peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat meningkatkan kemiskinan dan kriminalitas.

#### 5. Bagi Penulis

Sebagai wawasan hukum untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu diharapkan dapat memperluas wacana keilmuan mahasiswa sebagai civitas akademika.

### **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori hukum, serta melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat<sup>9</sup>. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu mengacu pada berlakunya atau kenyataannya yang terjadi dimasyarakat.<sup>10</sup> Penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, hal.51.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.17.

hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Malang Kota.

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Malang Kota dengan mengambil beberapa lokasi kasus peredaran minuman keras/alkohol secara bebas, yaitu Toko, Bar, dan tempat hiburan malam. Selain itu penelitian dilakukan pada para aparat penegak hukum (Polres Malang Kota) dan beberapa konsumen minuman keras/alkohol di wilayah hukum Polres Malang Kota. Adapun jenis-jenis data dan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Adalah jenis data yang diperoleh dari sumber informasi yang utama. Data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian dapat berupa hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi.

### b. Data Sekunder

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif. Yaitu diperoleh secara langsung melalui perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan AKP Syamsul Hidayat.,SH.,M.H selaku Kepala SatResnarkoba Polres Malang Kota yang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti untuk memperoleh data primer. Metode wawancara yang akan dilakukan dengan menggunakan metode terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis sehubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berasalkan dari catatan penting atau gambar baik dari instansi maupun perorangan guna memperkuat hasil penelitian.

#### c. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, dan berbagai informasi mengenai objek penelitian yang diperoleh baik dari media elektronik maupun media cetak.

#### 4. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya kemudian dibawa kedalam permasalahan yang sebenarnya. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan penanggulangan peredaran minuman keras/alkohol di Kota Malang dengan sarana hukum pidana. Sedangkan kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti, logis dan bersifat ilmiah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini, dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang mana akan dibagi menjadi beberapa sub bab didalam bab tersebut dengan sistematika yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latarbelakang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika

penulisan dari penelitian, sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan definisi dan teori-teori yang berkaitan dengan tema utama dari penelitian yang dilakukan. Teori-teori dalam tinjauan pustaka digunakan sebagai landasan pemecahan masalah mengenai peredaran minuman keras/alkohol di Kota Malang.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis memaparkan, mengurai, dan menganalisa terkait permasalahan yang diteliti yaitu peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin di Kota Malang.

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini adalah bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan pada bagian ini menjadi kesimpulan akhir yang berisi pemikiran, pendapat dan solusi atas penelitian yang dilakukan. Saran dan hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca.